

JURNAL PENELITIAN Humaniora

- Pelatihan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan Kelompok Pengangguran
- Peran BUMN dalam Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Pengaruh Personal *Job Fit* terhadap Hubungan Desain Kerja dan Kinerja Pengajar
- Kajian Perlindungan Hak Pasien sebagai Pencegahan Malpraktek Medik
- Semangat Kerja Masyarakat Kabupaten Bantul
- Isu Kesetaraan dan Keadilan Gender: Studi Kasus Novel Geni Jora Karya Abidah El-Khalieqy
- *Single Professional Women* sebagai Fenomena Gaya Hidup Baru di Masyarakat Yogyakarta (Studi Kasus: Kabupaten Sleman)



LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Volume 13, Nomor 2, Oktober 2008

ISSN: 1412 – 4009

JURNAL PENELITIAN Humaniora

Penerbit:

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab:

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta

Redaksi:

Ketua: Dr. Farida Hanum

Sekretaris: Yulia Ayriza, M.Si.

Anggota Redaktur: 1. Dr. Sudaryanto

2. Dr. Mukminan

3. Sri Sumardiningih, M.Si.

4. Prof. Dr. Suharti

5. Dr. Sukadiyanto

Redaktur Ahli: 1. Prof. Dr. Suminto A. Sayuti (UNY)

2. Dr. J. Nasikun (UGM)

3. Dr. Irwan Abdullah (UGM)

Redaksi Pelaksana 1. Ali Muhson, M.Pd.

2. Rachmat Nurcahyo, S.S.

Mitra Bestari: Prof. Dr. Wuradji, M.S. (UNY)

Tata Usaha/Pelaksana:

Suhardi, S.Pd.

Setting dan Tata Letak:

Ant. Hedi Ari Purwanto, S.IP.

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta
Gedung LPM Lantai II – Karangmalang, Yogyakarta. 55281
Telepon (0274) 586168 pesawat 242, 262, Fax (0274) 518617
<http://www.lemlit.uny.ac.id> dan e-mail: lemlituny@yahoo.com

Jurnal Penelitian Humaniora yang terbit pertama kali tahun 2001
merupakan lanjutan dari Jurnal Penelitian Iptek dan Humaniora
Frekuensi terbit: tengah tahunan

Semua tulisan yang ada dalam Jurnal Penelitian Humaniora bukan merupakan cerminan sikap dan/atau pendapat Dewan Redaksi. Tanggung jawab terhadap isi dan/atau akibat dari tulisan tetap terletak pada penulis.

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang terhormat,

Jurnal Penelitian Humaniora terbitan edisi ini memuat artikel tentang pemberdayaan masyarakat, semangat kerja, dan kajian tentang perempuan. Semua artikel merupakan hasil penelitian.

Pada penerbitan ini juga dimuat rambu-rambu untuk penulisan artikel di *Jurnal Penelitian Humaniora*. Untuk itu, pembaca yang bermaksud menulis atau mengirimkan artikelnya diharapkan mengikuti rambu-rambu yang dimaksud, yang tercantum di dalam bagian akhir *Jurnal Penelitian Humaniora* ini.

Perlu disampaikan pula di sini bahwa sampai saat ini masih ada artikel yang dikirimkan ke Dewan Redaktur *Jurnal Penelitian Humaniora* belum mengikuti rambu-rambu atau gaya selingkung penulisan yang diminta oleh *Jurnal Penelitian Humaniora*, misalnya format penulisan masih dalam bentuk ringkasan laporan penelitian, bahasa yang digunakan masih berupa bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar, dan sebagainya. Untuk itu, Dewan Redaktur berharap agar artikel yang dikirimkan ke *Jurnal Penelitian Humaniora* sudah benar-benar sesuai dengan rambu-rambu yang diminta oleh *Jurnal Penelitian Humaniora*.

Penerbitan *Jurnal Penelitian Humaniora* kali ini dapat terbit berkat adanya partisipasi dari para penulis artikel dan pembaca atau pelanggan tetap, yang selalu memberikan semangat dan motivasi supaya *Jurnal Penelitian Humaniora* tetap eksis. Dalam kesempatan ini, Dewan Redaktur mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Oktober 2008
Redaksi

JURNAL PENELITIAN

Humaniora

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| Pengantar Redaksi | i |
| Daftar Isi | iii |
| | |
| Pelatihan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan Kelompok Pengangguran <i>Oleh: Ibnu Syamsi</i> | 1-18 |
| | |
| Peran BUMN dalam Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah <i>Oleh: Purwanto</i> | 19-32 |
| | |
| Pengaruh Personal <i>Job Fit</i> terhadap Hubungan Desain Kerja dan Kinerja Pengajar <i>Oleh: Setyabudi Indartono</i> | 33-56 |
| | |
| Kajian Perlindungan Hak Pasien sebagai Pencegahan Malpraktek Medik <i>Oleh: Setiati Widihastuti</i> | 57-74 |
| | |
| Semangat Kerja Masyarakat Kabupaten Bantul <i>Oleh: Nahiyah J. Faraz</i> | 75-88 |

| | |
|---|---------|
| Isu Kesetaraan dan Keadilan Gender: Studi Kasus Novel Geni Jora Karya Abidah El-Khalieq <i>Oleh: Wiyatmi</i> | 89-104 |
| <i>Single Professional Women</i> sebagai Fenomena Gaya Hidup Baru di Masyarakat (Studi Kasus: Kabupaten Sleman) <i>Oleh: Dyah Kumalasari</i> | 105-124 |
| Biodata Penulis | 125-126 |

**PERAN BUMN DALAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH**

**Oleh:
Purwanto
Staf Pengajar FISE UNY**

Abstract

The research aims at knowing the role of BUMN in constructing and developing UMKM, in Eks administrative town (Kotatif), Cilacap. This research uses the design of ex post facto to obtain facts without manipulating the variable or creating certain condition. The research is done in questioner technique to 12 BUMN populations and 12 UMK sampling. However, based on the observation in BUMN, there are only 2 BUMN which is constructing and developing UMKM trough the partnership system: PT Pelindo III (Persero) dan PT Pertamina UP IV (Persero). The sample is obtained trough randomly sampling, then data is analyzed descriptively.

The result shows that BUMN has a significant role in constructing and developing UMKM in Eks Kotatif Cilacap trough the partnership program and environmental management (PKBL), 100 % UMKM in the research area has states that there are many advantages on the constructing and developing UMKM, especially in giving additional business capital. 83,33 % has stated their business has become more developed. The real actions of BUMN are as follow by: 1) giving a stimulant to business capital, 2) improving the management ability and production technique, 3) improving the skill of constructing and business engineering, 4) giving an easiness in providing means and infrastructure of production, 5) giving an easiness in getting the basic material, 6) improving the management ability in marketing system, 7) making familiar to the spirit of business, 8) training the quality of management, 10) setting up the distribution and promotion network.

Kata kunci Pembinaan dan pengembangan UMKM dari BUMN

PENDAHULUAN

Selama tahun 2000-2003 peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penciptaan nilai tambah semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 54,51% pada tahun 2000 menjadi 56,72% pada tahun 2003. Sebaliknya pengusaha besar justru semakin menurun dari 45,49% pada tahun 2000, menjadi 43,28% pada tahun 2003. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menjadi pemasok kebutuhan barang dan jasa nasional sebesar 43,80%, sedangkan usaha besar 42,10%. Pada periode 2001 – 2003 UMKM memiliki keunggulan dalam mendorong pertumbuhan PDB dalam sektor sekunder yang tumbuh masing-masing sebesar 5,60%, 4,65% dan 5,36%, sedangkan usaha besar hanya mengalami pertumbuhan 3,36%, 3,60% dan 4,04% pada periode yang sama. Dengan demikian kegiatan UMKM pada sektor sekunder dan tersier sangat potensial untuk didorong perkembangannya mengingat memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi. (www.depkop.go.id). Secara umum sejak krisis moneter tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 UMKM cukup potensial dalam menyumbang pertumbuhan PDB, berbeda dengan usaha besar sejak krisis tahun 1997 baru mulai bangkit pada tahun 2003 inipun pertumbuhannya tidak secepat seperti pertumbuhan UMKM. Perbandingan posisi keuangan tahun 1997 dan 2003 akan memberikan gambaran bahwa krisis ekonomi memiliki dampak negatif terhadap usaha menengah dan besar. Periode akhir tahun 2003 secara perlahan-lahan perekonomian nasional mulai terjadi *recovery* (kebangkitan). Usaha mikro dan kecil bangkit relatif lebih cepat dari dampak krisis ekonomi dan bahkan pernah memberikan kontribusi yang terbesar dalam perekonomian nasional, terutama pada saat puncak krisis tahun 1998 dan 1999, walaupun kemudian tergeser kembali oleh usaha besar.

Berbagai akar permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah keterbatasan permodalan, keterbatasan kemampuan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan

pasar, keterbatasan jejaring kerja, keterbatasan kemampuan manajerial, dan keterbatasan mendapatkan tempat usaha yang strategis dalam upaya untuk mengoptimalkan produktivitas dan peningkatan daya saing. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka UMKM mengalami kesulitan bila tidak memperoleh bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak terutama pemerintah dan pihak swasta melalui unit usaha yang dimiliki seperti BUMN dan perusahaan besar. Terkait dengan permasalahan tersebut, kiranya penelitian ini cukup urgen dilaksanakan sebagai upaya untuk menggali informasi mengenai seberapa besar peran BUMN dalam membantu dan mendorong, pertumbuhan perkembangan serta pembinaan kepada usaha kecil/koperasi dan masyarakat sekitar.

Menurut pasal 1 UU No 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya,
- 2) Mengejar keuntungan,
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak,
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang Belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi,
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. (UU No. 19 Tahun 2003 : Pasal 66)..

Selanjutnya berdasarkan pasal 66 UU No 19 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi

kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMN. Pasal 88 menegaskan bahwa BUMN harus menyetorkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Suatu upaya untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi kerakyatan serta peran/fungsinya BUMN, maka pemerintah melalui PP No 3/1983 mengizinkan kepada BUMN agar turut membantu pengembangan dan pembinaan UMKM, dan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Kemal Syamsudin mengatakan

“Dengan demikian jelas bahwa bagaimanapun juga BUMN tidak bisa meninggalkan fungsi dan peran sertanya dalam mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi UMKM yang semakin rentan terhadap perubahan dan guncangan ekonomi karena sering terjadinya kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah, padahal hingga kini sector UMKM telah mengerjakan dua per tiga dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 106,9 juta orang. Akibatnya sumbangan sector UMKM hanya 17 % dari seluruh nilai tambah manufaktur nasional. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi tawar UMKM dihadapan pemerintah. Dalam posisinya yang rentan terhadap guncangan ekonomi, UMKM membutuhkan peran serta dan dukungan BUMN sebagai penopangannya. (1995)

Sesungguhnya usaha mikro merupakan jenis usaha yang mayoritas terkonsentrasi pada sector produksi yang bersifat padat karya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 40/KMK.06/2003, tanggal 29 Januari 2003, usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun, dan dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50 juta. Keadaan ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi manakala mereka memperoleh bantuan dan pembinaan dari pihak lain. Sebab usaha

mikro ini memiliki beberapa ciri/kelemahan yang secara fungsional dapat diatasi oleh pihak ketiga. Adapun ciri/kelemahan usaha mikro adalah:

- 1) Belum melakukan manajemen keuangan yang baik,
- 2) Pendidikan SDM-nya rata-rata rendah, umumnya berpendidikan SD/SMP dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai,
- 3) Sebagian besar Belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak,
- 4) Umumnya tidak memiliki jalinan usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPPWP,
- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki umumnya kurang dari 4 orang. Ditinjau dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar potensial untuk dilayani dalam meningkatkan intermediasinya, karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain: 1) *turn over* umumnya cepat karena biaya manajemennya relatif rendah, 2) Pada umumnya pelaku usaha mikro tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan asal dilakukan melalui pendekatan yang tepat. (www.depkop.go.id).

Selanjutnya menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil merupakan usaha produktif yang berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak satu miliar per tahun, serta dapat menerima kredit dari perbankan di atas Rp 50 juta sampai Rp 500 juta. Sedangkan ciri dari usaha kecil adalah:

1. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walaupun masih dalam tahap sederhana, serta sudah mulai memisahkan antara keuangan keluarga dan keuangan usaha.

2. Sumber Daya Mannusianya relatif sudah lebih baik dan rata-rata berpendidikan SLTA dan ada yang sudah memiliki pengalaman dalam membuka usaha.
3. Usaha kecil ini pada umumnya sudah memiliki ijin usaha dan persyaratan lainnya termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah menjadi/berhubungan dengan perbankan, Namun belum dapat membuat *business plan*, sehingga masih sangat membutuhkan campur tangan pihak lain khususnya di bidang jasa konsultan dan pendampingan.
5. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki sekitar 5 sampai dengan 19 orang.

Terkait dengan permasalahan ini maka campur tangan atau keterlibatan pihak lain/pemerintah sangat diperlukan dalam upaya untuk pembinaan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan serta kestabilan usahanya. Pembinaan dan pengembangan yang dimaksud untuk: 1) Menunjang dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat meningkatkan kelas menjadi Usaha Menengah. 2) Meningkatkan usaha kecil dalam pembentukan/pembuatan produk pasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor, serta pemerataan Pendapatan dalam mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan isi pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, dimana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang: a) Produksi dan pengolahan, b) Pemasaran, c) Sumber Daya Manusia, dan d) Teknologi.

Pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan: a) meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan, b) meningkatkan kemampuan rancangan bangun dan perakayasaan, c) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan bahan baku, bahan penolong dan penemasan.

Pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan: a) melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, b) meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, c) menyediakan sarana dan dukungan promosi serta uji coba pasar, d) mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, dan e) membantu memasarkan produk usaha kecil.

Pembinaan dan pengembangan bidang Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan: a) memasyarakatkan dan membudayakan kegiatan kewirausahaan, b) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil, d) menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil.

Sedangkan di bidang teknologi pembinaan dan pengembangannya dapat dilakukan dengan: a) meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengembangan mutu, b) meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan disain dan teknologi baru, c) memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup, d) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, e) meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar teknologi, f) menumbuh kembangkan lembaga penelitian, disain dan teknologi usaha kecil. (UU No. 9 Tahun 1995)

Cara Penelitian

Desain penelitian ini adalah *expost facto*, karena penelitian ini bermaksud mengungkap fakta tanpa dilakukan manipulasi terhadap variabel ataupun menciptakan kondisi tertentu. Populasi penelitian sebanyak 10 BUMN, 37 Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) binaan BUMN yang ada di wilayah eks Kota Administratif Cilacap. Sampel penelitian diambil dengan teknik *area random sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah kecamatan yang ada di Eks Kota Administratif Cilacap. Berdasarkan survei di lapangan BUMN yang melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di eks

Kota Administratif Cilacap melalui Program Kemiteraan dan Bina Lingkungan (PKBL) hanya ada dua perusahaan yaitu: 1) PT Pelindo III (Pesero), 2) PT Pertamina (Pesero) UP IV Cilacap. Sedangkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dipilih sebagai sampel ada 12 UMK, terdistribusi dalam tiga kecamatan, yang terbagi menjadi dua kelompok binaan. Distribusi populasi dan sampel pembinaan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel Populasi dan Sampel UMK Binaan BUMN di eks Kota Administratif Cilacap

| Wilayah | UMK Binaan PT Pelindo III (Pesero) | | UMK Binaan PT Pertamina (Pesero) | |
|----------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | Populasi | Sampel | Populasi | Sampel |
| Kec. Cilacap Tengah | 4 | 2 | 10 | 2 |
| Kec. Cilacap Selatan | 5 | 2 | 8 | 2 |
| Kec. Cilacap Utara | 3 | 2 | 7 | 2 |
| Jumlah | 12 | 6 | 25 | 6 |

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner dan wawancara. Teknik kuesioner digunakan untuk menggali informasi dari BUMN mengenai kebijakan dan program yang telah dilakukan berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah eks Kota Administratif Cilacap. Untuk penggalan data ini menggunakan alat berupa angket terbuka. Kemudian teknik wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam kepada BUMN mengenai perannya BUMN dalam pembinaan dan pengembangan UMKM. Wawancara juga dilakukan kepada para Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), berkisar tentang permasalahan-permasalahan/hambatan-hambatan kegiatan usahanya, maju mundurnya usahanya, peluang-peluang usahanya, serta seberapa besar peran dan pengaruh serta manfaat yang dirasakan oleh UMKM terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BUMN. Untuk menggali informasi ini menggunakan alat berupa pedoman wawancara.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

PEMBAHASAN

BUMN yang melaksanakan dan menyelenggarakan Program Kemiteraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya ada 2 (dua) atau 20%, yaitu PT PERTAMINA (Pesero) UP IV Cilacap dan PT PELINDO III (Pesero). Pelaksanaan Program Kemiteraan dan Bina Lingkungan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan oleh Unit Khusus dari masing-masing perusahaan dengan satuan organisasi yang disebut Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (UPKBL)

Jumlah (populasi) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sedang menjadi binaan BUMN di eks Kota Administratif Cilacap sebanyak 37 usaha, terdiri dari: 1) Binaan PT PERTAMINA (Pesero) UP IV Cilacap sebanyak 25 UMK, 2) Binaan PT PELINDO III (Pesero) sebanyak 12 UMK.

Dalam tiga tahun terakhir, PT PERTAMINA (Pesero) UP IV Cilacap telah mengalokasikan dana sebesar Rp 576.753.350,00, guna penyelenggaraan program, dan mengalokasikan dana sebesar Rp 11.479.000.000,00 berupa dana pinjaman modal usaha kepada seluruh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Menengah se wilayah eks Kota Administratif Cilacap. Tetapi alokasi besaran dana khusus kota Cilacap tidak diketahui. Sedangkan PT PELINDO III (Pesero) juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 200.000.000,00 untuk biaya penyelenggaraan program, serta mengalokasikan dana sebesar Rp 4.195.000.000,00 berupa pinjaman modal usaha kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yang meliputi wilayah Kabupaten Cilacap dan eks Karesidenan Banyumas. Tetapi sebaran dana khusus untuk wilayah kota Cilacap tidak ditemukan/tidak diketahui.

Keterlibatan secara intensif kedua BUMN tersebut telah melakukan program pembinaan dan program pengembangan, dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha, program pelatihan manajemen usaha, program bantuan pemasaran produk, program pameran produk, program studi banding antar UMKM, biaya survei dan program monitoring UMKM binaan.

Di samping itu ke dua BUMN tersebut juga melaksanakan program khusus berupa peningkatan kemampuan manajerial usaha dan teknik perakayasaan produk. Usaha lain yang cukup urgen yang dilakukan oleh kedua BUMN, berupa bantuan jejaring kemudahan perolehan bahan baku, kemudahan perolehan mendapatkan sarana/prasarana usaha dan produksi, program memasyarakatkan/membudayakan jiwa *entrepreneur*, pembinaan serta program alih teknologi baru.

Berdasarkan hasil penelitian pembinaan dan pengembangan UMKM dengan cara memberikan kemudahan dalam perolehan bahan baku, pemasaran produk, jejaring pemasaran, kajian pemasaran dan kemasakan, peningkatan dan pemutakhiran teknologi serta pengendalian mutu, sangat besar manfaatnya yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro usaha kecil dan menengah. Program-program di atas secara intensif dilakukan oleh PT PELIDO III. Sedangkan pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah yang berhubungan dengan penyediaan sarana/prasarana usaha, pembentukan lembaga pemasaran, dukungan program promosi, dan jaringan distribusi, secara intensif dilakukan oleh PT PERTAMINA (Pesero) UPIV Cilacap.

Dalam aturan Program Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), berdasarkan hasil wawancara kepada responden kedua BUMN ternyata belum melakukan program pembinaan dan pengembangan UMKM khusus yang terkait dengan program pendidikan dan pelatihan (Diklat), pengembangan lembaga konsultasi UMKM pengembangan dan penerapan alih teknologi dan teknologi tepat guna, serta program pelestarian

lingkungan hidup. Walaupun ada sifatnya masih kasuistik dan belum dilakukan secara intensif. Dana pembinaan dan pengembangan untuk Usaha mikro Usaha Kecil dan Menengah yang dialokasikan oleh BUMN diambilkan dari penyisihan laba usaha sesuai dengan UU, namun demikian besarnya persentase dana yang dikelola tidak diketahui secara pasti karena kedua BUMN tidak bersedia menjelaskan secara rinci.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat yang menangani pembinaan, dalam hal ini Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, mengatakan bahwa sampai saat ini mekanisme kerjasama dengan pemerintah daerah belum diatur secara definitif. Sububungan dengan hal tersebut, maka para pelaku bisnis (UMKM) umumnya langsung berhubungan dengan BUMN tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Akses hubungan antara pelaku bisnis (UMKM) dilakukan langsung oleh kelompok BUMN melalui media masa baik surat kabar, buletin perusahaan, berita radio, dan informasi perorangan (antar UMKM). Animo UMKM terhadap program pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah cukup besar, hal ini terbukti daftar UMKM yang mengajukan proposal bantuan modal usaha cukup banyak, namun sampai saat ini proposal yang disetujui hanya sekitar 30%.

Menurut keterangan Kepala BUMN, program pembinaan dan pengembangan yang diluncurkan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM di eks Kota Administratif Cilacap, dan sebagian besar Usaha mikro Kecil dan Menengah yang menjadi binanya telah berhasil meningkatkan usahanya. Secara umum kesan para pelaku usaha (UMKM) 100% merasakan besar manfaatnya dengan adanya program pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BUMN, terutama dalam hal manajemen program usaha, rekayasa produk, pemasaran produk, strategi pemasaran dan pemasaran produk. Sehingga para pelaku usaha (UMKM) 83,33% menyatakan usaha mereka lebih maju terutama setelah mereka memperoleh bantuan modal dan

pembinaan dari BUMN. Sesuatu yang amat dirasakan oleh para pelaku usaha (UMKM) dengan semakin lancarnya usaha yang semula semua jenis pekerjaan hanya dikerjakan mereka dengan keluarganya, dan sesudah memperoleh stimulan dari BUMN mereka sudah mulai melibatkan orang lain (mangkat karyawan) bergerak antara 2 sampai dengan 5 orang karyawan. Kondisi ini jelas bila UMKM dibina secara konsisten dan kontinyu tidak mustahil dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran, dan dampak yang lebih luas UMKM dapat membantu mengatasi kemiskinan.

SIMPULAN

Tidak semua BUMN yang ada di eks Kota Administratif Cilacap melakukan program pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM. Hanya ada dua dari 10 BUMN atau (20%) yang menjalankan peran aktif dalam membina dan mengembangkan UMKM, yaitu melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di eks Kota Administratif Cilacap yang menjadi binaan BUMN sebanyak 37 buah.

Peran BUMN dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di eks Kota Administratif Cilacap cukup besar bagi para pelaku usaha (UMKM). Semua pengelola Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) atau 100% menyatakan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) memberikan manfaat yang cukup besar, terutama dalam bentuk pengelolaan/manajemen usaha. Sebagian besar UMKM (83,33%) menyatakan bahwa usaha mereka menjadi lebih maju setelah mendapat bantuan modal usaha. Adapun peran yang dilakukan oleh BUMN dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di eks Kota Administratif Cilacap meliputi: 1) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik produksi. 2) Meningkatkan kemampuan rancangan bangun dan perkerjasama produk. 3) Memberi stimulan modal usaha. 4) Memberi kemudahan da-

lam pengadaan bahan baku produksi. 5) Memberi kemudahan dalam pengadaan sarana/prasarana usaha. 6) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran. 7) Membantu pemasaran produk para UMKM. 8) Ikut membantu pemerintah dalam usaha membudayakan jiwa kewirausahaan. 9) Meningkatkan kemampuan, keterampilan dalam pengembangan disan produk, kemasan produk, dan teknologi tepat guna. 10) Membantu pengayaan model melalui penelitian dan pengkajian pasar. 11) Meningkatkan kemampuan teknologi produksi dan pengendalian mutu. 12) Menyediakan sarana komunikasi dalam rangka promosi. 13) Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi. 14) Melembagakan diklat untuk pengembangan UMK. Melalui penelitian ini dapat disarankan: a) Perlu adanya peningkatan bentuk pembinaan dan peningkatan terhadap UMKM agar dapat menghasilkan produk ekspor. b) Monitoring terhadap perkembangan usaha UMKM hendaknya dilakukan secara terprogram dan kontinyu yaitu dalam bentuk pendampingan usaha. c) Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara BUMN dengan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan UMKM agar berbagai potensi UMKM yang ada di daerah dapat berkembang secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Ismed, (2005). *Berbagai Masalah Yang Dihadapi Oleh Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan*. <http://www.smecda.go.id>. Download.com/deputi7/fileESISI%2024/ismeth.htm. Download. 7 Maret 2006
- Anonim. (2005). *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Nasional*, <http://www.depkop.go.id>. Download 16 Februari 2006

Syamsudin, Kemal, (2005). *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Nasional*, <http://www.depkop.go.id/koran.detail>. Download 16 Maret 2006

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995. *Tentang Usaha Kecil*. <http://www.depkop.go.id>. Download 8 Maret 2006

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003. *Tentang Badan Usaha Milik Negara. (BUMN)*. [http://www. Depkop.go.id](http://www.depkop.go.id). Download 8 Maret 2006